

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan zaman seperti yang kita rasakan sekarang ini, selain sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), juga disebabkan oleh kencangnya demokratisasi yang merambah dunia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (1999:145-146), bahwa: “Ada dua kekuatan utama yang mengubah dunia yaitu proses demokratisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan dunia yang terbuka”.

Di Indonesia kedua kekuatan tersebut telah mendorong lahirnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Gerakan reformasi itu menghasilkan perubahan yang fundamental dalam sistem politik Indonesia, di antaranya dengan dilakukannya pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004, baik untuk legislatif maupun untuk Presiden dan Wakil Presiden, bahkan mulai tahun 2005 kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) juga dipilih secara langsung. Hal ini terjadi setelah dilakukan amandemen UUD 1945 yang sebelumnya tidak tersentuh bahkan cenderung disakralkan.

Dari tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis sebagai sumber hukum yang berlaku di negara kita. Dengan amandemen UUD 1945 ini, maka keran kebebasan yang sebelumnya terbelunggu dibuka dengan lebar. Tetapi karena masih rendahnya mutu

---

pendidikan khususnya pendidikan politik, seringkali kebebasan itu menjadi kebablasan. Untuk itu pendidikan politik dan demokrasi perlu ditingkatkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lukman (2003:105), bahwa: “Dalam rangka menyelesaikan krisis multidimensional yang menimpa negeri ini, maka langkah yang pertama perlu segera dilakukan adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyat”. Pendapat senada dikemukakan oleh Fadila (2003:141), bahwa: “Untuk mewujudkan Indonesia baru ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, di antaranya perlu pembelajaran pendidikan politik pada semua warga negara, agar mengerti bagaimana menjadi warga negara yang baik”. Kedua pendapat tersebut menunjukkan begitu urgennya pendidikan politik dalam bermasyarakat dan benegara. Melalui pendidikan politik rakyat dibimbing dan diarahkan agar memahami persoalan politik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pendidikan politik tersebut harus dilaksanakan secara dini, sistematis, berkesinambungan, dan demokratis serta menghindari hal-hal yang bersifat indoktrinasi.

Pentingnya pendidikan politik ini, karena manusia tidak dapat menghindar dari masalah politik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dhal (1994:1), bahwa: “Politik adalah kenyataan yang tidak bisa dielakkan dalam kaitan dan keberadaan manusia. Semua orang boleh dikata terlibat dalam suatu bentuk di satu waktu tertentu pada salah satu macam sistem politik”. Pendapat senada dikemukakan oleh Djahiri (1989:2), bahwa: “Sebagai insan sosial politik, manusia tidak bisa menghindar dari pola hidup dan sistem kenegaraan”. Untuk itu perlu pendidikan politik, agar rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik secara sadar dan bertanggung jawab.

---

Pesantren sebagai salah satu subkultur kemasyarakatan kita, yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara Indonesia dalam sejarah perjalanannya, juga banyak mendapat imbas dari arus perubahan gerakan reformasi. Hal ini terlihat dengan banyaknya kaum santri/kiai yang ikut ambil bagian dalam gerakan reformasi dengan mendirikan partai Islam atau partai nasionalis yang mengusung nilai-nilai Islam. Tetapi hasilnya belum menggembirakan, hal ini terlihat dari hasil pemilu 1999 dan 2004, di mana partai-partai Islam kalah oleh partai-partai yang berbasis ideologi nasionalis sekuler. Kondisi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh El Moekry (2002:79), bahwa: "Pada segmen politik nyata-nyata mengalami kekalahan secara fatal, baik partai politik yang dibangun oleh warga NU maupun oleh Muhammadiyah". Bahkan kecenderungan yang muncul adalah menguatnya pengotakan umat Islam baik kepada partai maupun aliran. Kecenderungan lain adalah terjadinya eksploitasi kiai dan santri oleh para elit atau tokoh Islam tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga apabila pemahaman kiai dan santri terhadap permasalahan sosial politik meningkat akan mengganggu kepentingannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Falaakh (1999:166), bahwa: "Pemahaman kiai-ulama terhadap permasalahan sosial-politik akan memungkinkan mereka memasuki wilayah-wilayah yang selama ini terkesan tertutup dan tidak boleh dimasuki". Dengan demikian, menjauhkan pemahaman kiai dan santri dari permasalahan sosial politik merupakan skenario besar rezim penguasa yang berkolaborasi dengan elit atau tokoh Islam tertentu agar kepentingannya tidak terganggu.

Fenomena tersebut terjadi karena masih rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan umat Islam terutama di lingkungan pondok pesantren tradisional. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rofiq (Hisyam, 2003:149), bahwa: 'Ketika santri

---

dituntut terjun ke gelanggang politik, mereka bingung dan kikuk karena di pesantren tidak bisa dan biasa membaca literatur-literatur yang terkait dengan itu, semisal *al-Ahkaam al-Sulthaniyah* yang ditulis oleh Imam Mawardi'. Dalam kesempatan lain Rofiq (2000:211) mengemukakan, bahwa: "Kalaupun para santri atau alumni pesantren memiliki keterampilan berpolitik ..., lebih sebagai dampak bersentuhannya dengan kegiatan riil yang terlepas dari pesantren". Melihat kondisi tersebut, maka perlu ada kesadaran dari para pengelola pondok pesantren mengenai perlunya pendidikan politik bagi para santri. Pentingnya pendidikan politik bagi santri ini karena menurut Mulkan (2003:xi-xii):

Wacana keagamaan di Indonesia hampir mustahil dipisahkan dari dunia kaum santri beserta dinamika lembaga pesantrennya. Berbagai persoalan kebangsaan dan bagaimana mencari jalan pemecahan berbagai problem yang dihadapi bangsa ini bisa menjadi jelas dengan melihat kehidupan santri dengan dunia pesantrennya.

Hal tersebut karena penting dan strategisnya posisi santri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik sebagai barometer moral maupun sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan perjuangan para ulama. Besarnya peranan pondok pesantren dalam bermasyarakat dan bernegara ini menjadi rebutan para politisi terutama menjelang perhelatan politik seperti pemilu atau pilkada. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rofiq (Suaedy, 2000:210), bahwa:

Kalaupun pesantren dijadikan media politik, lebih diposisikan sebagai "komoditas", karena posisinya yang memang tidak berpolitik. Tetapi karena potensi suaranya yang besar dan relatif tidak menuntut kompensasi apa-apa, maka setiap kali menjelang pemilu, aktor-aktor politik beramai-ramai "nyerbu" pesantren untuk membagi-bagikan "uang rakyat".

Dengan demikian, masih rendahnya perhatian pondok pesantren terhadap pendidikan politik, merupakan peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan potensi pesantren yang begitu besar dalam rangka mewujudkan ambisi politiknya. Kondisi tersebut

---

memunculkan suatu adagium di kalangan pondok pesantren, bahwa pesantren bagaikan daun salam yang digunakan untuk pengharum masakan, tetapi apabila masakan sudah matang daun salam tersebut di buang. Artinya, bahwa pesantren (kiai dan santri) dibutuhkan untuk mendulang suara dalam pemilu, tetapi apabila pemilu telah selesai dan tujuan para politisi sudah tercapai pesantren dilupakan.

Agar pesantren tidak dijadikan komoditas politik, maka pendidikan politik di pondok pesantren yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dapat menjadi solusinya. Pendidikan politik di pondok pesantren ini bukan dimaksudkan untuk mendorong pesantren berpolitik secara praktis, tetapi agar pesantren mempunyai posisi tawar (*bargaining*) yang tinggi ketika berhadapan dengan kekuatan politik eksternal dan dapat menjadi gerakan moral dalam kehidupan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama demi kepentingan umat dan masyarakat.

Untuk terlaksananya pendidikan politik di pondok pesantren, kuncinya ada di tangan kiai. Hal ini karena (Dhofier, 1984:56): "...kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren". Kondisi ini terjadi selain karena masih kuatnya budaya paternalistik dalam masyarakat kita, juga karena pada umumnya kiai merupakan pendiri dan pengendali utama pesantren. Dengan demikian, kepemimpinan kiai sangat menentukan dalam setiap kegiatan di pondok pesantren, termasuk dalam pendidikan politik.

Hal tersebut karena menurut Rahardjo (Muhtadi, 2004:xxxii), bahwa: "Di Indonesia, dan mungkin di mana saja, kiai adalah pemimpin masyarakat, yang merupakan sumber politik. Karena itu, di samping kiai itu sendiri butuh berpolitik, para politisi juga butuh kiai, baik langsung maupun tak langsung". Pendapat senada dikemukakan oleh Turmudi

---

(2004:5), bahwa: “*pertama*, kiai secara tradisional adalah elite yang berpengaruh dalam umat Islam; *kedua*, kiai juga adalah elite politik yang mempunyai pengaruh kuat terhadap sikap-sikap politik umat Islam”. Artinya, pengaruh politik kiai ini bukan hanya terhadap santri saja, tetapi juga terhadap umat Islam pada umumnya. Dengan demikian, sebagai penentu kebijakan di pesantren, maka pendidikan politik di pondok pesantren akan berimplikasi secara signifikan terhadap perilaku politik santri.

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian akademis tentang pendidikan politik di pondok pesantren, terutama di pesantren tradisional sangat urgen dan perlu mendapat perhatian semua pihak. Hal ini karena walaupun sudah banyak kajian tentang pesantren tradisional, tetapi yang khusus mengkaji tentang pendidikan politik masih jarang atau bahkan hampir belum ada. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melakukan studi tentang pendidikan politik di pondok pesantren tradisional. Mengapa di pesantren tradisional? Karena kalau di pesantren modern kondisinya tidak jauh berbeda dengan di sekolah umum yang telah banyak dikaji atau diteliti secara akademis.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Besarnya peranan pondok pesantren dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menuntut pentingnya pendidikan politik bagi santri agar pesantren tidak dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “*Bagaimana implikasi pendidikan politik di pondok pesantren terhadap perilaku politik santri*”.

---

Agar pembahasan tentang implikasi pendidikan politik di pondok pesantren terhadap perilaku politik santri ini terfokus, maka penulis rumuskan pokok-pokok pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pendidikan politik di pondok pesantren?
2. Potensi dan kendala apakah yang dimiliki pondok pesantren dalam pendidikan politik?
3. Bagaimana peranan kiai dalam pendidikan politik di pondok pesantren?
4. Bagaimana gagasan aplikasi pendidikan politik di pondok pesantren sesuai dengan kondisi latar sosial budaya pesantren?

### **C. Verifikasi Konsep**

#### ***1. Implikasi***

Menurut Ali, et al (1999:374) implikasi (*implication*) mengandung arti:“(1) keterlibatan atau keadaan terlibat; (2) yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan”. Berimplikasi artinya mempunyai implikasi; adanya hubungan keterlibatan; ada sugesti atau pengaruh. Misalnya, latar belakang pendidikan seseorang akan berimplikasi terhadap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan politik di pondok pesantren akan berpengaruh terhadap perilaku politik santri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bertolak dari uraian di atas, yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan atau pengaruh pendidikan politik di pondok pesantren terhadap perilaku politik santri dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar pesantren. Perilaku politik tersebut bisa berupa partisipasi aktif dalam proses politik



sebaliknya berupa sikap apatis karena sistem politik tidak dapat mengakomodasi aspirasinya.

## **2. Pendidikan Politik**

Brownhill dan Smart (1989:9), mengemukakan bahwa: "Pendidikan politik adalah sebagai suatu cara untuk mempertahankan keadaan yang tetap stabil pada suatu saat tertentu, serta diharapkan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi yang lebih maju". Sementara menurut Kartono (1989:14), bahwa: "Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan politik yang bertanggungjawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik".

Berdasarkan pendapat di atas jelas, bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh bagi setiap warga negara dalam rangka membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) yaitu warga negara yang melek politik (*political literacy*), memiliki kesadaran politik (*political awareness*), dan berpartisipasi dalam kehidupan politik (*political participation*) secara cerdas dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud pendidikan politik dalam penelitian ini adalah pendidikan politik di pondok pesantren tradisional baik terpisah maupun terintegrasi dalam pengajian atau kegiatan pesantren.

## **3. Pondok Pesantren**

*Pondok*, merupakan asrama bagi santri, sementara *pesantren* secara etimologi berasal dari kata *santri*, dengan awalan *pe* dan akhiran *an*, *pe-santri-an* berubah menjadi *pesantren*, yang artinya *tempat santri*. Itulah sebabnya biasa dikenal dengan sebutan *pondok pesantren*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yunus (1995:231), bahwa:



---

“Pesantren ialah tempat santri-santri atau murid-murid yang belajar ilmu Agama Islam. Pondok ialah tempat penginapan mereka seperti asrama masa sekarang”. Jadi, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di mana para santrinya tinggal (menginap) di pondok yang ada dalam lingkungan pesantren di bawah bimbingan, pembinaan, dan pengawasan kiai. Adapun yang dimaksud dengan pondok pesantren dalam penelitian ini adalah pesantren tradisional (*salafiyah*) yaitu pesantren yang sistem pendidikannya nonformal dan mengkhususkan kajian terhadap literatur Islam Klasik (Kitab Kuning).

#### **4. Perilaku Politik**

Perilaku politik merupakan suatu perbuatan atau tindakan sosial baik secara individu ataupun kelompok dalam merespon suatu gejala yang ada di sekitarnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Apter (1977:334), bahwa: “Perilaku politik adalah tindakan individual dan kelompok dalam melakukan tindakan-tindakan politik”. Hal senada dikemukakan oleh Carr (Kantaprawira, 1999:26), bahwa: “Perilaku politik berkenaan dengan suatu tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik sangat luas cakupannya antara lain pengertian respons emosional berupa dukungan maupun apatis kepada pemerintah, respons terhadap perundang-undangan”. Pendapat tersebut diperkuat oleh Surbakti (1999:131), bahwa: “Perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik”. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik dalam penelitian ini adalah sikap dan tindakan seseorang atau sekelompok orang (santri) dalam kehidupan politik.

#### **5. Santri**

Menurut Hamid (1983:328), bahwa: “Kata santri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata *sant* = orang baik disambung *tra* = suka menolong. *Santra* berarti tempat untuk



menjadi manusia menjadi orang baik. Jadi, santri itu adalah orang baik dan suka menolong. Menurut Ali, et al (1999:878), bahwa: “Santri adalah orang yang mendalami agama Islam; orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh”.

Berdasarkan pandangan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kiai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari kitab-kitab Islam klasik. Dengan demikian, santri merupakan unsur penting bagi eksistensi sebuah pesantren dan kiai, sehingga sebuah pesantren (kiai) tanpa santri ibarat mobil (sopir) tanpa penumpang. Adapun yang di maksud dengan santri dalam penelitian ini adalah peserta didik yang belajar ilmu agama Islam di pondok pesantren di bawah bimbingan dan tanggung jawab kiai.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji pendidikan politik di pesantren Miftahul Huda Al Musri'. Dengan demikian, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui implikasi pendidikan politik di pondok pesantren terhadap perilaku politik santri. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi pendidikan politik di pondok pesantren.
2. Mengetahui potensi dan kendala yang dimiliki pondok pesantren dalam pendidikan politik.
3. Mengetahui peranan kiai dalam pendidikan politik di pondok pesantren.
4. Mengungkapkan gagasan aplikasi pendidikan politik di pondok pesantren sesuai dengan kondisi latar sosial budaya pesantren.

---

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: (1) Memperkaya khasanah kajian pendidikan politik, khususnya di pondok pesantren; (2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan partisipasi politik santri; (3) Sebagai masukan bagi para pengelola pondok pesantren dan para pengambil keputusan dalam pendidikan politik bagi santri.

#### **E. Paradigma Penelitian**

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 13 ayat (1) menyatakan, bahwa: “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Sebagai program pendidikan, maka pendidikan politik dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang memahami persoalan politik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Secara formal pendidikan politik diwadahi melalui PKn dari mulai pendidikan dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Melalui jalur informal pendidikan politik dilaksanakan dalam keluarga dan lingkungan. Sedangkan melalui jalur nonformal pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik (parpol), organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, pesantren, dan lain-lain.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Douwes Dekker, bahwa: “Jika tidak karena sikap kaum pesantren, maka gerakan patriotisme kita tidak sehebat seperti sekarang, kata tokoh

---

pergerakan nasional itu kala meletusnya Revolusi 17 Agustus 1945” (Kurniawan, 2004:17). Pengakuan tersebut merupakan salah satu bukti besarnya peranan pesantren dalam perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan yang terus berlanjut dalam mengisi kemerdekaan. Pendapat senada dikemukakan oleh Mastuhu (1994:22), bahwa: “Pada zaman revolusi fisik pesantren merupakan salah satu pusat gerilya dalam peperangan melawan Belanda untuk merebut kemerdekaan. Banyak santri membentuk barisan Hisbullah yang kemudian menjadi salah satu embrio bagi TNI”. Demikian pula menurut Sukanto (1999:328), bahwa: “... pada zaman penjajahan, peranan pesantren erat sekali dengan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah. Pesantren menjadi tempat sosialisasi politik dan pendidikan keprajuritan bagi para tentara Indonesia”.

Mengingat besarnya peranan pesantren dalam bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana dikemukakan di atas, maka pendidikan politik di pesantren merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar komunitas pesantren tidak dijadikan objek politik oleh elit tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal ini karena secara empirik pendidikan politik di pesantren tradisional masih kurang mendapat perhatian baik dari para pengelola pesantren sendiri maupun orpol, ormas, LSM, dan pemerintah. Kondisi tersebut menurut Rofiq (Hisyam, 2003:149), berakibat: ‘Ketika santri dituntut terjun ke gelanggang politik, mereka bingung dan kikuk karena di pesantren tidak bisa dan biasa membaca literatur-literatur yang terkait dengan hal itu, semisal *al-Ahkaam al-Sulthaniyyah* yang di tulis oleh Imam Mawardi’. Keadaan ini tidak akan terjadi apabila para pengelola pondok pesantren memahami dan menyadari pentingnya pendidikan politik bagi santri, sehingga ketika santri terjun ke masyarakat dapat menyikapi persoalan politik yang terjadi secara cerdas.

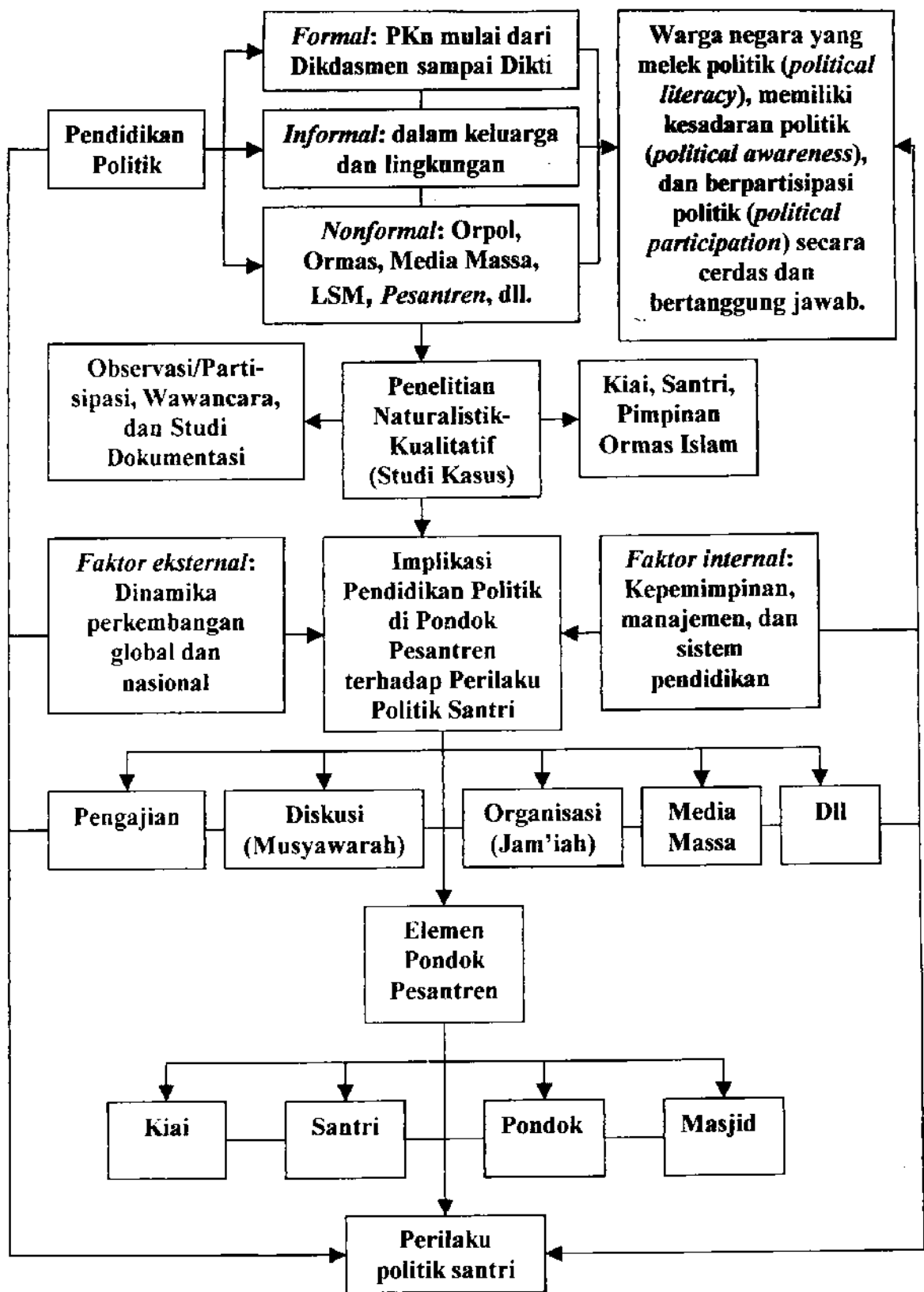
---

Pentingnya pendidikan politik di pesantren khususnya dan umat Islam pada umumnya, karena menurut Ibnu Qoyyim (Djazuli, 2003:14), bahwa: “Tidak ada siyasah kecuali dengan syara”. Artinya, politik itu harus sesuai dengan ajaran agama. Sementara menurut Rahardjo (Muhtadi, 2004:xxxii), bahwa: “Islam itu adalah sekaligus *al din wal daulah*, agama dan politik, agama dan negara”. Bahkan menurut Zuhri (1982:157), bahwa: “Islam dan politik tidak bisa dipisahkan sebagaimana gula dengan manisnya”. Dari ketiga pendapat tersebut jelas, bahwa dalam Islam politik merupakan bagian dari ajaran agama. Untuk itu kebijakan politik tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, dalam Islam pendidikan politik merupakan alat dan sekaligus bagian dari syi’ar Islam.

Menurut Kurniawan (2004:18), bahwa: “Dengan pesantren, Islam tidak dikembangkan sekadar menjadi alat untuk membangun bangsa. Lebih dari itu, ia menjadi bingkai bangunan bangsa yang berakidah kuat dan berakhlak tinggi”. Dengan demikian, pesantren diharapkan dapat menjadi gerakan moral dalam kehidupan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama demi kepentingan bangsa dan negara.

Pendidikan politik di pesantren tradisional umumnya terintegrasi dalam kegiatan pesantren, yaitu melalui pengajian, keteladanan, latihan pidato, diskusi, musyawarah, *bahtsul masa’il*, organisasi (*jam’iah*), media massa, dan lain-lain. Melalui pendidikan politik ini diharapkan santri sebagai warga negara dapat menunjukkan perilaku politik berupa partisipasi politik yang konstruktif, cerdas, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, secara konseptual paradigma penelitian mengenai “implikasi pendidikan politik di pondok pesantren terhadap perilaku politik santri”, dituangkan dalam bentuk bagan sebagaimana tertera di halaman berikut.



Bagan 1: Paradigma Penelitian tentang Pendidikan Politik di Pondok Pesantren.

## **F. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di pondok pesantren Miftahulhuda Al Musri', yang terletak di Kampung Pasirangka Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Alasan dipilihnya pondok pesantren Miftahulhuda Al Musri' sebagai lokasi penelitian, karena pondok pesantren Miftahulhuda Al Musri' merupakan salah satu pondok pesantren tradisional dengan menerapkan manajemen modern secara bertahap, di antaranya pengorganisasian dengan pembagian tugas yang jelas dan penilaian hasil belajar (prestasi) santri secara berkala.

### **2. Subjek Penelitian**

Menurut Nasution (1996:32), bahwa: "Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi atau yang dapat diwawancarai". Lebih lanjut Nasution (1996:32) mengemukakan, bahwa: "Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive* (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu, berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, dan jumlahnya kecil". Atas dasar pertimbangan tersebut, maka subjek penelitiannya dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok subjek penelitian dari lapangan lingkungan pesantren terdiri dari kiai dan santri. Untuk santri diambil dari santri senior (Ma'had 'Aly dan Dirosatul 'Ulya) yang dipilih dari berbagai daerah yang berbeda dan diusahakan yang orang tuanya memiliki pesantren atau pernah mesantren di tempat lain. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan representatif.

b. Kelompok subjek penelitian dari pimpinan lembaga/ormas Islam tingkat Propinsi Jawa Barat. Informasi yang diperoleh dari pimpinan ormas Islam ini diharapkan dapat melengkapi data yang diperoleh dari lapangan.

Jumlah subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi dalam studi ini tidak dibatasi oleh ukuran-ukuran yang kaku, dalam arti disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan bagi terkumpulnya informasi dan ketuntasan pemunculan makna realitas alamiah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I mengemukakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah; rumusan masalah dan pertanyaan penelitian; verifikasi konsep; tujuan dan manfaat penelitian; paradigma penelitian; metode penelitian; lokasi dan subjek penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II menguraikan kajian pustaka tentang implikasi pendidikan politik di pondok pesantren terhadap perilaku politik santri, meliputi: pendidikan politik terdiri dari pengertian pendidikan politik, tujuan pendidikan politik, materi pendidikan politik, pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan IPS, pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan politik; pondok pesantren terdiri dari pengertian pondok pesantren, karakteristik umum pondok pesantren, klasifikasi pondok pesantren, dan sistem pendidikan pondok pesantren; pendidikan politik di pondok pesantren terdiri dari pendidikan politik dalam perspektif Islam, kepemimpinan kiai dan pendidikan politik, perilaku politik santri dan pendidikan politik.



---

Bab III mengemukakan metode penelitian yang mencakup: pendekatan penelitian; instrumen penelitian; subjek penelitian; data, sumber data, dan teknik pengumpulan data; prosedur pengolahan dan analisis data; validasi data; dan pengumpulan data.

Bab IV mengemukakan hasil penelitian dan pembahasannya, meliputi: temuan-temuan penelitian terdiri dari profil pondok pesantren Miftahulhuda Al-Musri<sup>7</sup>, program pendidikan dan metode pembelajaran, jadwal kegiatan pondok pesantren; pembahasan dan analisis yang terdiri dari kondisi pendidikan politik di pondok pesantren, potensi dan kendala pendidikan politik di pondok pesantren, peranan kiai dalam pendidikan politik di pondok pesantren, dan gagasan aplikasi pendidikan politik di pondok pesantren.

Bab V mengemukakan kesimpulan dari isi tesis ini serta rekomendasi yang dianggap perlu. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi ini mengacu kepada permasalahan penelitian yang tercantum dalam bab I.